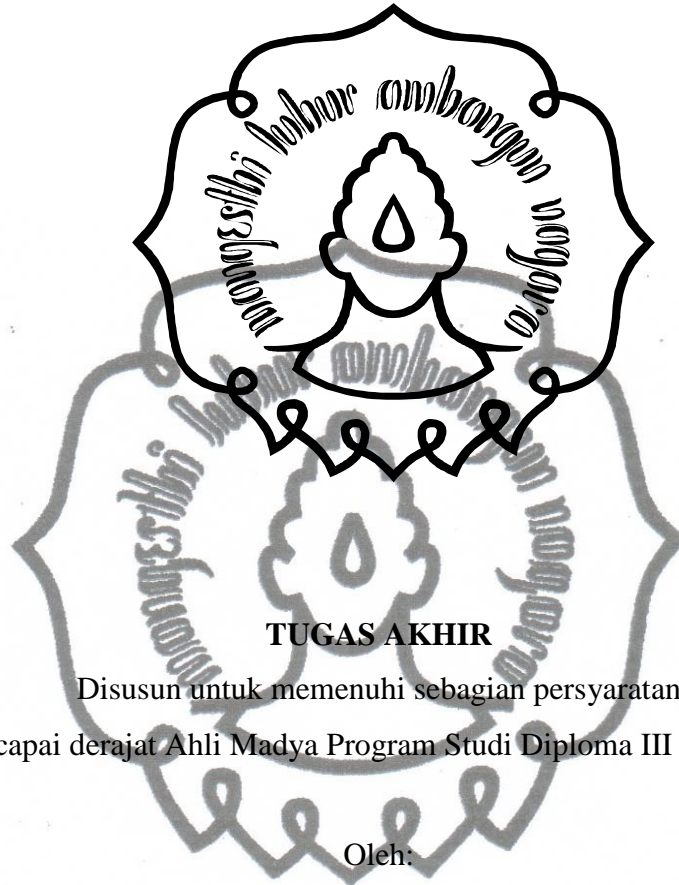


**EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN
BOYOLALI**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

DANAR SURYA NUGRAHA

NIM F3407026

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

commit to user

ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF THE ADVERTISEMENT TAX ON DISTRICT
BOYOLALI****DANAR SURYA NUGRAHA****F 3407026**

This thesis is intended to determine the level of effectiveness of the advertisement tax in the District of Boyolali.

As formulated in this thesis include; level of advertisement tax revenue contribution to local income, the ratio of tax revenue with a potential billboard advertisement tax and any obstacles encountered in the collection of advertisement tax.

From these formulations is known that the advertisement tax is levied only 63.44% of the existing potential of the advertisement tax. Hence, from these results is expected to be able to perform DPPKAD recalculated local revenues for the sector especially the advertisement tax in each district in Boyolali.

Key words : Advertisement tax, local income.

HALAMAN PERSETUJUAN

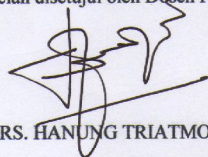
Tugas Akhir dengan Judul :

**EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN
BOYOLALI**

telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli
Madya Program Studi D III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret

Surakarta, 29 Juni 2010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing



DRS. HANUNG TRIATMOKO, MSI, AK

NIP. 19661028 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul :

**EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN
BOYOLALI**

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir

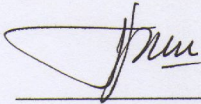
Program Studi Diploma 3 Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 28 Juli 2010

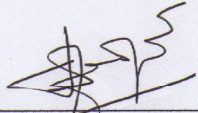
Tim Penguji Tugas Akhir

DRS. SRI HARTOKO, MBA., AK
NIP. 19610711 198703 1 002



Penguji

DRS. HANUNG TRIATMOKO, MSI., AK
NIP. 19661028 199203 1 001



Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, anggaplah itu sebagai awal dari sebuah kesuksesan ”

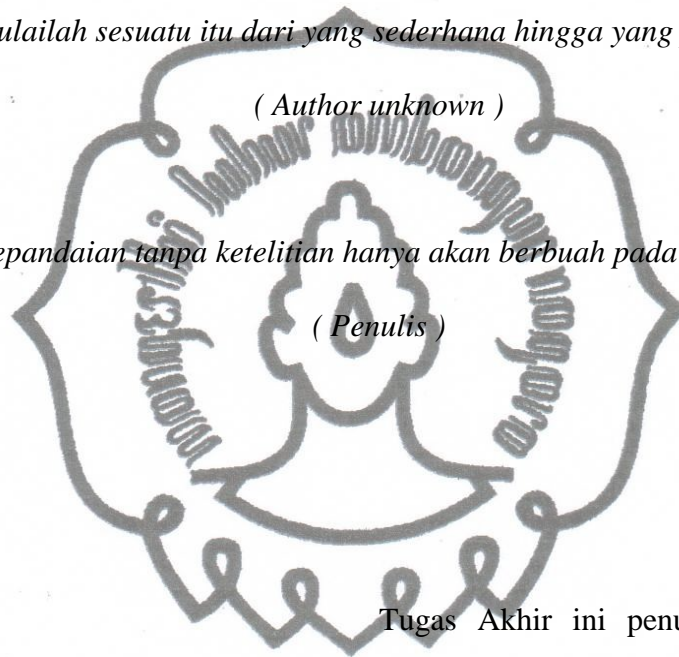
(Author unknown)

“ Mulailah sesuatu itu dari yang sederhana hingga yang paling sukar “

(Author unknown)

“ Kepandaian tanpa ketelitian hanya akan berbuah pada penyesalan “

(Penulis)



Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu
2. Adik – adiku Arya dan Dian
3. Seluruh keluarga besarku
4. Almamaterku

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul **"EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI"**.

Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan tugas akhir ini:

1. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Harnanto, M.Si., Ak, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Hanung Tri Atmoko, M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis, terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya disela-sela kesibukannya.
5. Bapak Drs. Hanung Tri Atmoko, M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.

commit to user

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk masa depan penulis.
7. Bapak Ibu yang saya cintai dan sayangi, yang sentiasa memberi kritik, saran dan doa yang tulus untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Drs. Sugiyatno, M.Si., selaku Kepala DPPKAD terima kasih telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan magang kerja disana, beserta seluruh staff yang selalu memberikan dorongan, masukan serta informasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Adik-adikku Lulus Arya Rifpana dan Gemilang Dian Permata Artika Sari, terima kasih doanya.
10. Kakek Nenek, makasih doanya.
11. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas semangat dan doanya.
12. Teman-teman D3 Perpajakan 2007 yang kompak dan solid selalu.
13. Teman-teman PMS (Didit Mardita, S.kom, Manol, Gayuh, Lulus dan Agus), terima kasih kritikan-kritikan yang pedas tapi membangun, “ ayo kapan mancing lagi...?”
14. Anak-anak kost Budhi Luhur (Suko, Simbah, Krisa, Kempleng, dan lain sebagainya) terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama ini.
15. AD 6852 AM yang selalu menemani pergi.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun.

commit to user

Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Boyolali, 15 Juni 2010

Penulis



commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	3
D. MANFAAT PENELITIAN.....	4
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	4
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Pajak.....	7
B. Fungsi Pajak.....	7

commit to user

	C. Sistem Pemungutan Pajak	8
	D. Pengelompokan Pajak	8
	E. Pajak Daerah	9
	F. Dasar Hukum.....	10
	G. Pajak Reklame.....	10
	H. Potensi Pajak Reklame	13
	I. Prosedur Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame.....	13
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. GAMBARAN UMUM KANTOR DPPKAD KABUPATEN BOYOLALI	14
	B. PEMBAHASAN	
	1. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	28
	2. Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame dengan potensi Pajak Reklame	30
	3. Kendala yang Dihadapi DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam Pemungutan Pajak Reklame	48
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	49
	B. SARAN	49
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005 – 2009	29
3.2	Penerimaan Pajak Reklame tahun 2009	32
3.3	Potensi Reklame Kecamatan Boyolali	39



DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Bagan Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Boyolali 27



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penyelesaian Magang Kerja

Lampiran 2. Memo Laporan Kegiatan Magang

Lampiran 3. Surat ijin Magang Kerja

Lampiran 4. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009

Lampiran 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2009

Lampiran 6. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Boyolali, Tahun 2005-2009

Lampiran 7. Contoh SKPD Yang Telah Terisi



ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF THE ADVERTISEMENT TAX ON DISTRICT
BOYOLALI****DANAR SURYA NUGRAHA****F 3407026**

This thesis is intended to determine the level of effectiveness of the advertisement tax in the District of Boyolali.

As formulated in this thesis include; level of advertisement tax revenue contribution to local income, the ratio of tax revenue with a potential billboard advertisement tax and any obstacles encountered in the collection of advertisement tax.

From these formulations is known that the advertisement tax is levied only 63.44% of the existing potential of the advertisement tax. Hence, from these results is expected to be able to perform DPPKAD recalculated local revenues for the sector especially the advertisement tax in each district in Boyolali.

Key words : Advertisement tax, local income.

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sekarang ini pendapatan asli daerah dan sumber yang mendukungnya sudah merupakan bagian yang penting dalam komponen setiap daerah. Terlebih dengan adanya otonomi daerah yang diharapkan pemerintah daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerah secara optimal. Artinya, pemerintah daerah harus berupaya untuk terus menggali dan mengembangkan potensi daerah dengan sungguh-sungguh, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Namun, yang lebih penting bukan terletak pada keinginan untuk meletakkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, akan tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber dana atau keuangan yang relatif memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah adalah potensi daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah,

commit to user

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen pendapatan asli daerah tersebut yang paling besar pemasukannya adalah dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pajak daerah sendiri banyak sekali komponennya mulai dari pajak reklame, hotel, restoran, pajak penerangan jalan, pajak penggunaan bahan galian golongan C dan pajak parkir, begitu pula dengan retribusi yang memiliki banyak komponen. Namun kenyataan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah mengingat dua hal tersebut merupakan penerimaan terbesar bagi pendapatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan melakukan perhitungan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat diketahui seberapa besar seharusnya penerimaan yang diterima oleh Kabupaten Boyolali baik itu dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah.

Oleh karena itu disini penulis akan menyoroti pajak daerah untuk pajak reklame khususnya di wilayah kecamatan Boyolali. Kebanyakan masyarakat dalam pemasangan reklame tidak melakukan prosedur pemasangan reklame atau asal pasang, bahkan tempat pemasangan reklame masuk dalam lokasi dengan besar pajak tertinggi. Terlebih dalam pemasangannya dalam bentuk kontruksi. Seharusnya mereka melakukan perijinan ke DPPKAD khususnya bagian pendapatan asli daerah yang menangani langsung tentang pajak-pajak daerah termasuk salah satunya pajak reklame. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakan perhitungan terhadap potensi

pajak daerah khususnya pajak reklame, mengingat pajak tersebut (Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali) adalah pajak yang memiliki jumlah kedua terbesar dalam penerimaan pendapatan di Wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan perhitungan potensi pajak reklame dapat diketahui seberapa besar seharusnya penerimaan yang diterima oleh Kabupaten Boyolali khususnya untuk wilayah kecamatan Boyolali. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka penulis mengambil judul: **“EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN BOYOLALI”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Berapa perbandingan penerimaan pajak reklame dengan potensi pajak reklame ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

commit to user

1. Untuk mengetahui berapa tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui berapa perbandingan penerimaan pajak reklame dengan potensi pajak reklame.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Boyolali.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pajak daerah khususnya pajak reklame yang didalamnya ada perhitungan tentang tingkat penerimaan pajak dari sektor pajak reklame.

2. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai sumber masukan untuk DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam kaitannya pajak reklame.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di dua tempat.

- a. Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, yaitu dari penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak reklame

- b. Dilokasi-lokasi pemasangan reklame yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendata jumlah reklame yang belum terdata oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali.

2. Data dan Sumber

Jenis data yang digunakan adalah;

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber atau pihak terkait.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan pihak yang terkait, dalam hal ini adalah staf Pendapatan Asli Daerah

b. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan melakukan pendataan langsung ke lapangan.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Kualitatif

Adalah proses analisa data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka

commit to user

atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisa ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pajak reklame yaitu analisa data dengan realisasi.

b. Metode Kuantitatif

Adalah proses analisa data dengan menggunakan angka atau data statistik untuk mengetahui besarnya jumlah pajak reklame yang ada di Kabupaten Boyolali.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir.

Bab III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah yang diteliti.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak

Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008:1)

Pajak (R. Santoso Brotodiharjo dalam Prof. Dr. P. J. A Adriani, 1991) ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. (Waluyo, 2007 : 2)

B. Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang-bidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu.

C. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang masih harus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak.

D. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektif, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

commit to user

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

E. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2008 : 12)

Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu

1. Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi)

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota)

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Restoran

- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Reklame
4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Reklame

G. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Reklame) adalah pungutan daerah untuk penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Objek Reklame

Objek reklame adalah semua penyelenggara reklame, yang dikecualikan dari objek pajak adalah penyelenggara yang telah diatur dalam peraturan daerah.

3. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

4. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame/produk dan/atau produk/biro reklame yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pribadi lain yang menjadi tanggungannya.

5. Penetapan Kawasan dan Lokasi Penyelenggaraan Reklame

Penetapan kawasan reklame digunakan untuk menetapkan besaran sewalihan titik reklame untuk jenis papan berkontruksi. Penetapan kawasan reklame untuk wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut

- a. Kawasan A meliputi : Jalan Pandanaran (Solo – Semarang) dan Kawasan dalam kota Boyolali
- b. Kawasan B meliputi : Jalan Merbabu, Merapi, Perintis Kemerdekaan, Cendana, Jogjakarta-Solo, dan Jalan Solo Semarang (kawasan luar kota Boyolali) serta lingkungan bandara Adi Sumarmo.

- c. Kawasan C meliputi : Lingkungan pasar Cepogo, Karanggede, Ampel, Simo, Pengging, dan pasar Andong serta Jalan Prof. Dr. Suharso (lingkar utara)
- d. Kawasan D meliputi : kawasan diluar A,B, dan C

Penetapan lokasi reklame digunakan untuk menentukan besarnya pengenaan pajak reklame. Penetapan lokasi reklame untuk wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut

- a. Lokasi A meliputi :
 - 1) Reklame yang melintang Jalan Provinsi Solo-Semarang dan sekitar Bandara Adi Sumarmo.
 - 2) Reklame yang melintang Jalan Pandanaran.
 - 3) Reklame pada median Jalan Provinsi.
- b. Lokasi B meliputi :
 - 1) Reklame yang melintang Jalan Boyolali-Magelang.
 - 2) Reklame ditepi Jalan Provinsi Solo-Semarang.
 - 3) Reklame ditepi Jalan Pandanaran.
 - 4) Reklame ditepi Jalan Provinsi dan Kabupaten disekitar bandara.
 - 5) Reklame ditepi Jalan Solo-Jogjakarta.
- c. Lokasi C meliputi :
 - 1) Reklame ditepi Jalan Boyolali-Magelang, Jalan Provinsi diluar Kecamatan Boyolali.
 - 2) Reklame ditepi Jalan Kabupaten wilayah Kecamatan Boyolali diluar lokasi A dan B.
 - 3) Lokasi disekitar pasar diluar lokasi A dan B dengan radius 500 m.

d. Lokasi D meliputi :

- 1) Reklame ditepi Jalan Kabupaten diluar Kecamatan Boyolali
- 2) Reklame diluar lokasi A, B dan C.

6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

H. Potensi Pajak Reklame

Estimasi potensi pajak reklame dilakukan dengan survey terhadap objek pajak reklame. Informasi yang dicatat dalam survey antara lain adalah: nama reklame, alamat tempat pemasangan reklame, jenis reklame, ukuran reklame. Pengamatan ini difokuskan pada jenis reklame yang permanen karena memiliki jangka waktu pemasangan selama 1 tahun.

I. Prosedur Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Pemegang Kas Penerima dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
4. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

BAB III

PEMBAHASAN

G. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali

Pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, belum merupakan dinas tetapi hanya merupakan seksi dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Boyolali. Mengingat tugas dari bagian tersebut maka dari salah satu seksi diubah menjadi dinas penghasilan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali 7 Maret 1974 No. Hukum B.3/III/1974 yaitu dengan nama Dinas Penerimaan Daerah Tingkat II Boyolali.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPP7/12/41/-101 tertanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Daerah Tingkat II Boyolali dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1979 tanggal 18 September 1979 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Boyolali. Wewenang pemerintah daerah dalam rangka mengelola pendapatan daerah, oleh pemerintah pusat ditetapkan undang-undang yang mengatur pengadaan pendapatan daerah dengan *commit to user* terbentuknya;

- a. Undang-undang No. 11/drt/1957 tentang Pajak Daerah.
- b. Undang-undang No. 12/drt/1957 tentang Pajak Daerah.
- c. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat perkembangan tersebut maka pemerintah daerah mendorong perlu adanya pemisahan seksi maupun sub bagian pendapatan daerah di dalam perekonomian pemerintah daerah menjadi suatu dinas yang berdiri sendiri di Daerah Tingkat II Boyolali dinamakan Dinas Pendapatan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan daerah, Perda No. 7 tahun 1979 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diterbitkan Perda No. 9 tahun 1991 sebagai pemberlakuan sistem dan prosedur Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) yaitu sistem baru dibidang perpajakan, redistribusi daerah, pendapatan lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di wilayah Boyolali, maka dibentuklah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Boyolali. Cabang Dinas ini dipimpin oleh kepala cabang dan dibantu oleh urusan tata usaha dan beberapa sub seksi dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah menerbitkan Perda No. 7 tahun 1979 dan No. 9 tahun 1991 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kemudian mulai tanggal 31 Januari 2008 Pemerintah Kabupaten Boyolali menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 3 tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Dimana SOTK sebelumnya pengelolaan pendapatan dikelola pada satu dinas (Dinas Pendapatan Daerah) dan pada SOTK baru (DPPKAD) pengelolaan pendapatan dikelola pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah.

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Keuangan,
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Seksi Dinas Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah,
 - 3) Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyusunan APBD,
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah,
 - 3) Seksi Evaluasi Administrasi APBD.

- e. Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan,
 - 2) Seksi Pembendaharaan,
 - 3) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
- f. Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Aset Daerah,
 - 2) Seksi Pendataan Aset Daerah,
 - 3) Seksi Utang Piutang dan Investasi
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 2) Pengordinasian dan perencanaan dalam upaya pengelolaan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pembendaharaan serta pembiayaan dan pengelolaan aset daerah.

Kemudian di dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat susunan organisasi menurut jabatannya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok:
Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Fungsi Kepala Dinas:
 - a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - c) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan.
 - e) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan.
 - f) Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dana aset daerah.

- g) Mengelola program dan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- h) Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, penelitian dan pelaporan
- 2) Fungsi dari sekretariat:
 - a) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
 - b) Pengelolaan keuangan.
 - c) Pengelolaan perencanaan, penelitian dan pelaporan.
- 3) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan administrasi umum, meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
commit to user

hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang.

b) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

c) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, meneliti dan menilai serta menyusun laporan.

c. BIDANG PENDAPATAN

1) Bidang Pendapatan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pendataan, penetapan wajib pajak, menyusun target atau menghitung realisasi, melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menyusun dan menyiapkan naskah rancangan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

2) Fungsi dari Bidang Pendapatan:

a) Perencanaan, pendapatan, penetapan, pemungutan, penerimaan dan penagihan yang meliputi pajak daerah, restribusi daerah, serta pendapatan lain-lain yang sesuai dengan kewenangannya.

- b) Perencanaan, pengawasan, penelitian, pengembangan guna peningkatan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat.
 - c) Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
 - e) Pemantauan realisasi sumber pendapatan daerah bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya.
 - f) Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara teknis mengenai pajak daerah, restribusi, PBB dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Bidang Pendapatan terdiri dari:
- a) Seksi Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas pokok:
Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan dibidang pendapatan asli daerah.
 - b) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah, mempunyai tugas pokok:
Merencanakan, memantau dan mengawasi dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.

- c) Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan, mempunyai tugas pokok:

Merencanakan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional pendapatan.

d. BIDANG ANGGARAN

- 1) Bidang Anggaran, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program/kegiatan dibidang anggaran.

- 2) Fungsi dari Bidang Anggaran:

- a) Perencanaan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- b) Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- c) Penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD, pedoman pelaksanaan APBD.
- d) Pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga.

- 3) Bidang Anggaran terdiri dari:

- a) Seksi Penyusunan APBD, mempunyai tugas pokok:

Merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan penyusunan APBD, perubahan APBD, menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, menyiapkan anggaran kas dan SPD.

- b) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan, mengelola, dana belanja tidak langsung SKPD, monitoring, pengendalian, pembinaan dan analisa pelaksanaan dana bantuan daerah.

- c) Seksi Evaluasi Administrasi APBD, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis dibidang evaluasi administrasi APBD.

e. BIDANG AKUNTANSI DAN PEMBENDAHARAAN

- 1) Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program/kegiatan dibidang akuntansi dan pembendaharaan.

- 2) Fungsi dari Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan:

- a) Pelaksanaan sistem akuntansi dan petunjuk teknis pengelolaan kas daerah dan melaksanakan fungsi pengelolaan dan pembendaharaan daerah serta menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.
- b) Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah (BUD), menyiapkan anggaran kas, SPD dan menerbitkan SP2D belanja

langsung dan tidak langsung, serta menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

3) Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

b) Seksi Pembendaharaan, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengujian kebenaran data urusan kepegawaian dan meneliti data gaji pegawai, rutin non gaji, membina ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian pembendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai.

c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengelolaan, penerimaan, dan pencatatan pendapatan secara tunai maupun surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito.

f. BIDANG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

- 1) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah dan transaksi utang piutang dan investasi.

- 2) Fungsi dari Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah:

a) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian program/kegiatan dibidang pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah.

b) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian program/kegiatan dibidang transaksi utang piutang dan investasi.

- 3) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:

- a) Seksi Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang-barang kekayaan yang menjadi aset daerah.

- b) Seksi Pendataan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan barang-barang yang menjadi aset daerah.

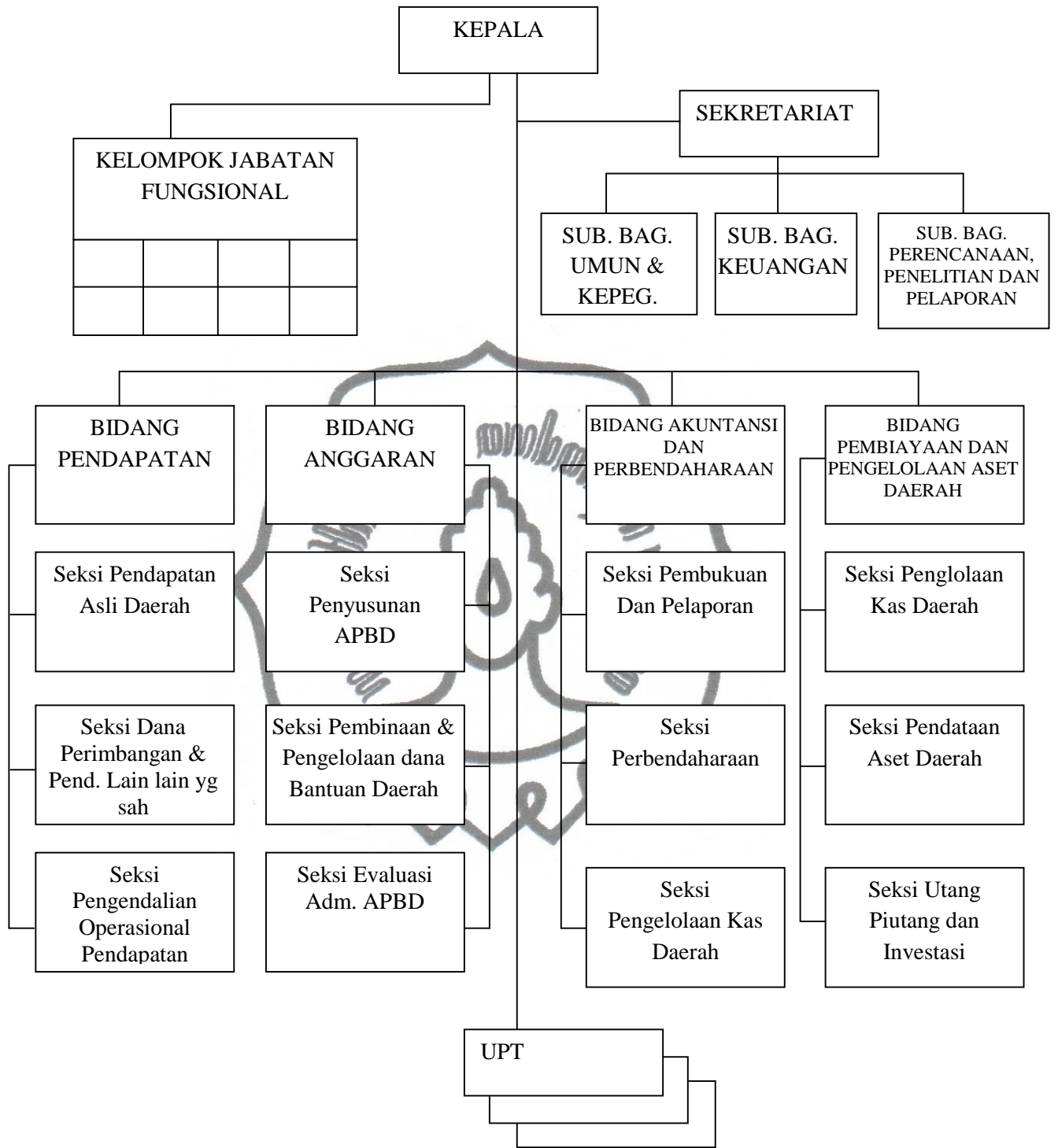
- c) Seksi Utang Piutang dan Investasi, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan penatausahaan utang piutang dan investasi daerah serta merealisasikan pembayaran atas perjanjian akibat yang lain kepada pihak ketiga.

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.





Gambar 3.1

Bagan Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Boyolali

H. PEMBAHASAN

Melihat pajak reklame merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar dibandingkan penerimaan pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Boyolali, maka penulis ingin mengkaji pajak reklame di Kabupaten Boyolali.

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam menentukan tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yaitu dengan membandingkan jumlah per tahun realisasi pajak reklame di Kabupaten Boyolali dengan jumlah pendapatan asli daerah per tahun sehingga diperoleh hasil dalam prosentase. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebahai berikut ;

$$\text{KONTRIBUSI} = \frac{\text{Jumlah realisasi pajak reklame per tahun}}{\text{Jumlah seluruh PAD per tahun}} \times 100\%$$

Begitu pula untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak reklame di Kecamatan Boyolali juga menggunakan rumus yang sama yaitu membandingkan jumlah per tahun realisasi pajak reklame di Kecamatan Boyolali dengan jumlah pendapatan asli daerah per tahun.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1

**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005 – 2009**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2005	94.200.000	123.182.990	49.816.712.683	0,2473
2006	110.140.000	152.247.885	59.307.283.906	0,2567
2007	200.740.000	204.965.796	67.461.523.228	0,3038
2008	223.000.000	303.629.532	63.733.408.461	0,4764
2009	323.000.000	383.754.851	73.951.338.137	0,5189
Rata-rata		233.556.211	62.854.053.283	0,3606

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali

Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali di kantor DPPKAD Boyolali dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Tahun 2005

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 123.182.990,-}{\text{Rp } 49.816.712.683,-} \times 100\% = 0,2473 \%$$

b. Tahun 2006

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 152.247.885,-}{\text{Rp } 59.307.283.906,-} \times 100\% = 0,2567 \%$$

c. Tahun 2007

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 204.965.796,-}{\text{Rp } 67.462.523.228,-} \times 100\% = 0,3038 \%$$

d. Tahun 2008

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 303.629.532,-}{\text{Rp } 63.733.408.461,-} \times 100\% = 0,4764 \%$$

commit to user

e. Tahun 2009

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 383.754.851,-}{\text{Rp } 73.951.338.137,-} \times 100\% = 0,5189 \%$$

f. Rata-rata dari tahun 2005-2009

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 233.556.211,-}{\text{Rp } 62.854.053.283,-} \times 100\% = 0,3606 \%$$

Dari tabel 3.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selalu memenuhi target bahkan cenderung melebihi target yang ditetapkan dan dapat diketahui pula bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kontribusi pajak reklame terhadap PAD sebesar 0,2473%, tahun 2006 naik menjadi 0,2567 %, tahun 2007 sebesar 0,3038 %, tahun 2008 sebesar 0,4764 % dan terakhir pada tahun 2009 sebesar 0,5189 %, meskipun dari segi penerimaan pada tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2008.

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu lima tahun ini adalah 0,3606 %,

2. Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame dengan Potensi Pajak Reklame

Estimasi potensi pajak reklame di Kematan Boyolali dilakukan dengan survey langsung terhadap objek pajak reklame yang berada diwilayah Kecamatan Boyolali. Informasi yang dicatat dalam survey

antara lain : nama reklame, lokasi pemasangan, jenis reklame dan ukuran reklame. Untuk jenis reklame ini berupa reklame menempel, kontruksi, kontruksi 2 muka dan menempel/kontruksi bercahaya.

a. Lokasi-lokasi Reklame di Kecamatan Boyolali

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009, lokasi penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Boyoli dibagi atas 5 lokasi yaitu : Lokasi A, Lokasi B, Lokasi C, dan Lokasi D. Namun, untuk wilayah Kecamatan Boyolali hanya Lokasi B dan Lokasi C, yaitu :

1) Lokasi B meliputi :

- a) Reklame yang melintang Jalan Boyolali-Magelang.
- b) Reklame ditepi Jalan Provinsi Solo-Semarang.
- c) Reklame ditepi Jalan Pandanaran.
- d) Reklame ditepi Jalan Provinsi dan Kabupaten disekitar bandara
- e) Reklame ditepi Jalan Solo-Jogjakarta.

2) Lokasi C meliputi :

- a) Reklame ditepi Jalan Boyolali-Magelang, Jalan Provinsi diluar Kecamatan Boyolali.
- b) Reklame ditepi Jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Boyolali diluar lokasi A dan B.
- c) Lokasi Sekitar pasar diluar lokasi A dan B dengan radius 500m.

Tabel 3.2

Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2009 Kecamatan Boyolali

No	Nama dan Alamat Reklame	Ukuran	Ket	Pajak
		(m2)		(Rp)
1	Tk. Bunga Daryono	0,5		27.000,00
2	Omega Elektronik	0,6		27.400,00
3	Jamu Akar Sari	1		29.000,00
4	Panorama Motor	2		29.000,00
5	Total Flaser	1,26		30.100,00
6	Sayur Gunung	1,15		31.000,00
7	Toko Kelontong Atol	1,6		31.400,00
	Atol			
8	Griya Indosat	2		33.000,00
9	Suku Cadang	2		33.100,00
10	Foto Rochmad	3		37.000,00
11	Divya Cell	3		62.000,00
12	Buana (Kekurangan Setor)	2,25		63.250,00
13	Lampu Philips	3		64.400,00
	Toko Pulung Rejeki Sunggingan			
14	Aspira	4		66.000,00
	Tk. Semarang Motor			
15	Griya Indosat	8		66.000,00
16	Primagama	4		66.000,00
17	Kondang Motor	0,45		77.400,00
18	Panorama Motor	0,3		78.600,00
19	Apotik Gemah	1		80.400,00
20	Kurnia Optik	1		80.400,00
21	Swamitra	0,96		85.700,00
	Sunggingan			
22	Pegadian	0,72		85.750,00
23	Juve Motor	2,25		98.000,00
24	Mizzle	2		99.000,00
25	Family Motor	0,8		99.900,00
26	FIF (2008)	1,5		100.500,00
27	FIF (2009)	1,5		100.500,00
28	Asgros	2		109.000,00
29	Swamitra	2		109.000,00
	Perempatan Seiko			
30	Swamitra	2		109.000,00
	Sunggingan			
31	Buana	2,25		113.250,00

32	Pasar Rakyat Simpedes	6		124.500,00
	Dalam Kota			
33	BNI	3		126.000,00
34	Western Union	0,25		135.800,00
35	Juve Motor	5		141.000,00
36	Bank Panin	5		148.500,00
37	Danamon Simpan Pinjam	4,8		150.800,00
38	Buana	6		152.700,00
39	Yamaha	6		152.750,00
40	Muslih Motor	7,4		159.228,00
41	Panorama Motor	8,4		163.900,00
42	Esia	9		166.500,00
43	Pegadian	4	2 mk	168.000,00
44	Swamitra	4		168.000,00
	Perempatan Seiko			
45	Swamitra	4		168.000,00
	Perempatan Seiko			
46	Unit Pelayanan Modal Mikro	4		168.000,00
47	XL (2008)	4		168.000,00
48	XL (2009)	4		168.000,00
49	Pondok Asri 2008	0,245		188.800,00
	Depan Pasar Boyolali			
50	Baks Malang	0,5		190.200,00
51	Ghibon Video Shoting	0,75		191.500,00
	Perempatan Seiko			
52	Soto Rumpit	1,125		193.500,00
53	Zona Reklame	0,96		197.000,00
54	Atlas	2,25		199.600,00
55	Atlas 2008	2,25		199.600,00
	Perempatan Terminal			
56	Atlas 2009	2,25		199.600,00
57	Mayapada	1,125	2 mk	199.600,00
	Depan Pasar Sunggingan			
58	Mayapada Mitra Usaha	1,125	2 mk	199.600,00
	Depan Pasar Sunggingan			
59	1 Jam Cair	1,5		203.600,00
60	Bintang Jaya Motor	0,75		203.650,00
61	Rokok Sukun	2	2 mk	209.000,00
	Sunggingan			
62	Swamitra	2		209.000,00
	Perempatan Seiko			
63	Swamitra	2	2 mk	209.000,00
	Perempatan Seiko			
64	Suzuki	15		221.500,00
	No. 28			

65	A Mild	2	2 mk	271.500,00
	Depan Pasar Boyolali			
66	Daihatsu Xenia	4		271.500,00
67	Exel Comindo Pratama	4		271.500,00
	Depan Galaxy			
68	Exel Comindo Pratama	4		271.500,00
	Sunggingan			
69	Exel Comindo Pratama	4		271.500,00
	Pertigaan Kantor Pos			
70	Sampoerna	2	2 mk	271.500,00
	Tk. Mekar Jaya			
71	Yamaha Kusuma Jaya Motor	4		271.500,00
72	Danamon Simpan Pinjam	4,8		275.000,00
73	BNI	0,6		276.750,00
74	Bank Panin	2		276.900,00
75	ATM BRI	3,24		288.150,00
	Depan Shorum Yamaha			
76	CJDW	3		290.500,00
77	Dapur Solo	4,5		298.375,00
78	Bank BRI	8		304.000,00
79	Dika Backery	4		304.000,00
	Depan Galaxy			
80	Petronas Oil	4,5		310.750,00
	Harum Motor (Halaman Sendiri)			
81	Asli Motor	3	2 mk	333.750,00
82	Cardinal	12		360.000,00
	Amigo			
83	Panorama Motor	0,9		373.750,00
84	Wall Painting	18		373.750,00
85	Yamaha	18		373.750,00
86	BPR Nusamba	21		391.750,00
	Sunggingan			
87	Esia	3,8		455.150,00
88	Unilever	12		474.000,00
	Utara Pasar Sunggingan			
89	Esia	6		540.500,00
	Pertigaan Kantor Pos			
90	Indosat (1/10)	6		540.500,00
	Depan Sun Motor			
91	Telkomsel	6		540.500,00
92	Bank Danamon Simpan Pinjam	8		554.000,00
	Depan Puskesmas Sunggingan			
93	Sampoerna Hijau	8		554.000,00
	Pertigaan Pasar Sunggingan			
94	ABC	2		560.750,00

	Utara Jembatan Sonokridanggo			
95	ABC 2008	3		560.750,00
	Utara Jembatan Sonokridanggo			
96	Kolle	7		574.250,00
	Pasar Boyolali			
97	Galaxy	6		599.000,00
98	Wings 2008 (3 Buah)	3		659.250,00
	Depan Pasar Sunggingan			
99	Maspion (1/10)	30		830.000,00
100	Produk Unilever (2/10)	15		873.750,00
	Sunggingan (Jl. Pekutut)			
101	GP. Radial (3/10)	10	2 mk	970.000,00
	Tk. Semarang Motor			
102	Djarum (4 Buah)	2		1.043.000,00
	Depan Terminal			
103	Wings 2009	36		1.448.000,00
	Depan Pasar Boyolali			
104	Indosat	24		1.514.000,00
	Depan Toko Mas Kupu			
105	Telkomsel	24		1.514.000,00
106	Djarum (6 Buah)	2		1.562.400,00
	Depan Pasar Boyolali			
107	Asli Motor	20		2.045.000,00
108	Dji Sam Soe	24		2.764.000,00
109	Antangin 2008	32		3.072.000,00
	Depan Pasar Boyolali			
110	Class Mild	32		4.962.000,00
	Depan Suzuki			
111	Apotik Rahma	1		54.500,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
112	Aritika	3		37.000,00
	Sonolayu			
113	Aroma / Class Mild (4/10)	24		1.514.000,00
114	Atlas 2008	2,25		199.600,00
	Pertigaan BK			
115	Atlas 2008	1		199.600,00
	Pertigaan Rumah Sakit			
116	Atlas 2009	1		199.600,00
	Pertigaan BK			
117	Atlas 2009	1		199.600,00
	Pertigaan Rumah Sakit			
118	Cat Mobil Oven	0,625		40.500,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
119	Elang Sari	6,25		101.900,00
	Solo-Semarang			

120	Esia Sonolayu	6		540.500,00
121	Esia Prof. Suharso	6		540.500,00
122	Esia Pojoy Perum. Pulisen	6		540.500,00
123	Exel Comindo Pratama Dekat Griya Pulisen	8		554.000,00
124	Exel Comindo Pratama Pertigaan BK	8		554.000,00
125	Exel Comindo Pratama Prof. Suharso	8		554.000,00
126	Exel Comindo Pratama Patung Sapi	8		554.000,00
127	Himbauan Hemat Energi Timur Terminal	17,18		1.080.000,00
128	Indosat Perintis Kemerdekaan	6		540.500,00
129	Kimia Farma	3,75		145.200,00
130	KSP Bina Raharja Jl. Perintis Kemerdekaan	4,5		298.375,00
131	KSP Bina Raharja Jl. Perintis Kemerdekaan	1,5		83.000,00
132	Kupu Promotion Jl. Perintis Kemerdekaan	2		33.000,00
133	Mayang Puspita Jl. Perintis Kemerdekaan	1,5		43.500,00
134	Mebel Barokah Prof. Suharso	1		80.400,00
135	Philips Hasap Elektronik	3,6		64.400,00
136	Puri Merbabu Prof. Suharso	0,75		191.600,00
137	Radio Kharisma Jl. Perintis Kemerdekaan	1,4		82.550,00
138	Sampoerna Tk. Gunawan Panggung	2	2 mk	271.500,00
139	Semen Tiga Roda Tk. Maju Jaya Penggung	3		59.900,00
140	Semen Tiga Roda Tk. Berkah Jaya	3		59.900,00
141	Semen Tiga Roda (TB. Karomah Berlin) Jl. Perintis Kemerdekaan	3		91.150,00
142	SPBU <i>commit to user</i>	6		805.000,00

	Kenteng Panggung			
143	SPBU	6		805.000,00
	Plosokerep Winong			
144	Suzuki	7,2		158.300,00
	Depan Terminal			
145	Suzuki	3,6		64.400,00
	Depan Terminal			
146	Suzuki	17,1		1.626.200,00
	Depan Terminal			
147	Suzuki Solo Indonesia Utama	8		554.000,00
	Depan Terminal			
148	Telkomsel	6		540.500,00
	Pertigaan BK			
149	Telkomsel	6		540.500,00
	Depan SMK 1			
150	Telkomsel (2008)	24		1.514.000,00
	Jl. Prof. Suharso			
151	Telkomsel (2009)	24		1.514.000,00
	Jl. Prof. Suharso			
152	Telkomsel dan Gerai Halo (1/10)	3		126.000,00
153	Telkomsel dan Gerai Halo (1/10)	2,607		403.300,00
154	A Mild	2		271.500,00
	Panggung (Tk. Gunawan)			
155	Air Minum Isi Ulang	1		33.000,00
	Jl. Cendana			
156	Aneka Es dan Soto	3		49.500,00
	Jl. Kates			
157	Apotik Assalam	0,75		31.000,00
	Jl. Kantil			
158	Apotik Berlian Farma (2008)	1		29.000,00
	Pasekan			
159	Apotik Berlian Farma (2008)	1		54.000,00
	Pasekan			
160	Apotik Berlian Farma (2009)	2		85.750,00
	Pasekan			
161	Apotik Berlian Farma (2009)	2		85.750,00
	Pasekan			
162	Apotik Gudang Sehat	1,5		83.000,00
	Jl. Jeruk			
163	Apotik Merbabu	1		83.000,00
	Jl. Merbabu			
164	ATM Mandiri	2,5		37.000,00
	Jl. Kates			
165	Bank BTPN	10		567.500,00
	Jl. Kates			

166	Bank Guna Daya Jl. Merapi	2,5		88.500,00
167	Bank Mega Mitea Jl. Kates	10		567.500,00
168	Bokor Tk. Mas Sunggingan	2		33.000,00
169	BRI Mudal	10		171.500,00
170	Dji Sam Soe Tk. Mama Pasekan	2		372.500,00
171	Exel Comindo Jl. Cendana	4		271.500,00
172	Fotocopy Jl. Merbabu	4		53.500,00
173	Indo Motor Nagata Jl. Cendana	2		24.800,00
174	Indosat 2008 Jl. Kates	6		290.500,00
175	Joyo Koyo Jl. Boyolali - Semarang	1,5		85.600,00
176	Kimia Farma Perempatan Agraria Jl. Jambu	2		198.250,00
177	Koperasi Rejeki Jl. Merbabu	0,25		25.900,00
178	KSP. Arta Mas Singkil	4		33.000,00
179	Lippo Bank Jl. Kates	40		940.000,00
180	Maliboro (Tk. Sumarno) Kios Pasar Sunggingan	0,5		77.700,00
181	Mandiri Jl. Kates	4		116.000,00
182	Mandiri Plus Jl. Kates	2		58.000,00
183	Natalia Jl. Teratai	4		66.000,00
184	Natalia	4		116.000,00
185	Natalia Jl. Merapi	2		85.750,00
186	Oli Top One			
187	Percetakan Jl. Teratai	1,5		29.000,00
188	Po. Tunggal Daya Kios Terminal Boyolali	7		223.375,00
189	Positron <i>commit to user</i>	0,25		130.950,00

	Jl. Jeruk Gudang			
190	Salon Sriwijaya	0,5	2 mk	136.875,00
	Jl. Merbabu			
191	Salon Vena	1		27.750,00
	Jl. Pahlawan			
192	Sampoerna (Tk. Indra)	4		53.500,00
	Jl. Teratai			
193	Sampoerna (Tk. Makmur)	1,5		104.375,00
	Kios Pasar Sunggingan			
194	Sampoerna (Tk. Teratai)	1,5	2 mk	59.875,00
	Jl. Teratai			
195	Semar (1/10)	27		597.750,00
	Tk. Mas Sunggingan			
196	Srikandi (1/10)	18		373.750,00
	Tk. Mas Sunggingan			
197	Telkomsel	6		290.000,00
	Jl. Jambu			
198	Toyota	6		102.750,00
	Timur Pom Bensin Panggung			
199	Toyota	1,5	2 mk	59.875,00
	Selatan Kantor DPUPK			
200	U Mild	6		102.750,00
201	Yamaha	0,75		93.100,00
	Jl. Pahlawan			
202	Yamaha	6		474.000,00
	Tacung			
Total Pajak				70.014.103,00

Sumber ; DPPKAD Kab. Boyolali

Tabel 3.3

Potensi Pajak Reklame

No	Nama dan Alamat Reklame	Potensi		
		Ukuran (m ²)	Ket	Pajak (Rp)
1	Air Minum Isi Ulang Winong	1,5	2 mk	62.000,00
2	Apollo Alumunium Jl. Pandanaran	1	2 mk	385.750,00
3	Bengkel Mobil maju Jaya Pasekan	1	2 mk	160.750,00
4	Bigland Tk. Furniture Terakota Jl. Pandanaran (Bercahaya)	1,5	2 mk	1.044.875,00

5	Bimbel Pelita Harapan Indonesia Jl. Perintis Kemerdekaan, Selatan RSU	16		610.000,00
6	BPR Restu Klepu Makmur Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
7	CAHAYA Toko Elektronik Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
8	Citra Madonna Selluler Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
9	Djangkung Video Shoting Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
10	Djangkung Video Shoting Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
11	Estu Utomo Penggung	0,5		190.187,50
12	Fren " Arien's cell " Jl. Pandanaran	1,5		31.000,00
13	Hotel Mutiara Indah Barat Pom Bensin Sunggingan	2		198.250,00
14	Hotel Pondok Asri Tlatar	2		85.750,00
15	Hotel Puri Pondok Indah Barat Pom Bensin Sunggingan	2		33.000,00
16	Indy Motor Winong	6	2 mk	305.500,00
17	Kantor Notaris PPAT Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
18	KSP. Bhineka Manunggal Jaya Barat Pom Bensin Sunggingan	1,5	2 mk	391.125,00
19	Marning Asli Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
20	Marning Asli Jl. Pandanaran	0,75	2 mk	383.062,50
21	Marta Reklame Jl. Pandanaran	1,125	2 mk	387.093,75
22	Maspion TB. Rukun, Pasekan	24		352.500,00
23	Media Informatika Jl. Pandanaran	1,5	2 mk	391.125,00
24	Neva Sakti Jl. Perintis Kemerdekaan	2	2 mk	396.500,00

25	Pintu Masuk Pancingan 1 Tlatar	1,5		43.500,00
	Tlatar			
26	Putra Mandiri Ban	1	2 mk	160.750,00
	Penggung			
27	Rias Pengantin	0,75	2 mk	758.062,50
	Jl. Pandanaran			
28	Rias Pengantin Mia	0,75	2 mk	758.062,50
	Jl. Pandanaran			
29	RM. Gumelar	2	2 mk	171.500,00
	Penggung			
30	RM. Gumelar	0,75	2 mk	158.062,50
	Penggung			
31	RM. Gumelar	3,75	2 mk	540.312,50
	Penggung			
32	RM. Gumelar	0,5	2 mk	155.375,00
	Penggung			
33	RM. Kasandra	0,5	2 mk	155.375,00
	Penggung			
34	RM. Pak Sopir 2	1,5	2 mk	166.125,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
35	Rumah Makan Dewi	3	2 mk	182.250,00
	Penggung			
36	Sido Tentrem Motor	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
37	Soto Daging Sapi dan Masakan Jawa	1	2 mk	385.750,00
	Penggung			
38	Soto Daging Sapi	0,375	2 mk	379.031,25
	Penggung			
39	Spesial Sambal	0,25	2 mk	377.687,50
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
40	Telkomsel " Arien's cell "	1,5		31.000,00
	Jl. Pandanaran			
41	Tiara Foto Digital	1,75	2 mk	106.312,50
	Pasekan			
42	Tirta Aji Air Minum Kesehatan Kita	1,5		43.500,00
	Kios Pasar Pasekan			
43	Toko Bunga Surya	2		198.250,00
	Jalan Pandanaran			
44	New Era (Toko dpn Pst Boyolali)	5	2 Bh	296.250,00

	Jl. Pandanaran			
45	Apollo Alumunium	3		62.000,00
	Jl. Pandanaran			
46	Bakso, Soto, Mie Ayam	1,125	2 mk	162.093,75
	Kebonbimo, Tlatar			
47	Canon	0,25		106.500,00
	Kebonbimo, Tlatar			
48	Canon	0,25		106.500,00
	Kebonbimo, Tlatar			
49	Endah	0,75	2 mk	158.062,50
	Kebonbimo, Tlatar			
50	Hotel Pondok Asri	2	2 mk	171.500,00
	Jl. Pahlawan			
51	Toko Widodo	1,5		166.125,00
	Jl. Kates			
52	Remaja Sport	1,5		24.750,00
	Jl. Kates			
53	Toko Buku Pepak	0,75		21.750,00
	Jl. Kates			
54	Apotik Dan Praktik Dokter	0,375		189.515,63
	Jl. Pandanaran			
55	Star Steak	0,375		159.750,00
	Jl. Pandanaran			
56	KSP. Lodjinawe	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
57	BPR Restu Klepu Makmur	1,5	2 mk	62.000,00
	Jl. Pandanaran			
58	ABC Biru	0,375	2 mk	40.500,00
	Jl. Jambu			
59	Anugerah Cell	1	2 mk	385.750,00
	Jl. Pandanaran			
60	Apotik Manunggal	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
61	Apotik Sunggingan	1,5	2 mk	53.625,00
	Jl. Pandanaran			
62	Queen Salon	0,25	2 mk	377.687,50
	Jl. Pandanaran			
63	Apotik Sunggingan	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
64	Apotik dan Praktek Dokter	0,375	2 mk	379.031,25
	Apotik Miranti, Jl. Pandanaran			

65	SHARP	24		379.000,00
	Jl. Pandanaran			
66	CV. Aditama	0,225	2 mk	89.918,75
	Jl. Kenanga			
67	Pranoto Optik	2	2 mk	396.500,00
	Jl. Pandanaran			
68	Optik Noer	1,125	2 mk	162.093,75
	Jl. Pandanaran			
69	Karya Indah Gypsum	1,313		30.250,00
	Jl. Pandanaran			
70	Rumah Makan Lumayan	1,875		32.500,00
	Jl. Pandanaran			
71	Apotik	0,225	2 mk	377.418,75
	Jl. Pandanaran			
72	Ahass	0,5	2 mk	380.375,00
	Jl. Pandanaran			
73	Bimbingan Belajar Neutron	2,25	2 mk	174.187,50
	Jl. Pandanaran			
74	Neutron	12	2 mk	214.500,00
	Jl. Pandanaran			
75	Lodjinawe	0,45	2 mk	379.837,50
	Jl. Pandanaran			
76	KSP. Artha Biru	0,15	2 mk	151.612,50
	Jl. Pandanaran			
77	Bakso dan Soto Malang	0,75	2 mk	383.062,50
	Jl. Pandanaran			
78	Kayu Kalimantan	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
79	BTPN	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
80	Foto Copy Serena	2,5		38.437,50
	Jl. Pandanaran			
81	CV. Prasetya Mulya	1		30.375,00
	Jl. Pandanaran			
82	Marcell (Tk. Pepak)	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
83	Kurnia Optik	0,75	2 mk	383.062,50
	Jl. Pandanaran			
84	Kurnia Optik	1,125	2 mk	31.046,88
	Jl. Pandanaran			
85	Bank Mitra	0,75	2 mk	383.062,50

	Jl. Pandanaran			
86	Oleh-Oleh Phia Diva	0,375	2 mk	379.031,25
	Jl. Pandanaran			
87	Marning Masakini	1,75	2 mk	393.812,50
	Jl. Pandanaran			
88	Marning Murni	0,5	2 mk	380.375,00
	Jl. Pandanaran			
89	Marning Mutiara Jaya	0,5	2 mk	380.375,00
	Jl. Pandanaran			
90	Marning Banaran	0,5	2 mk	380.375,00
	Jl. Pandanaran			
91	Apollo Alumunium	3	2 mk	407.250,00
	Jl. Pandanaran			
92	Ade Motor	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
93	Las Bubut	0,25	2 mk	377.687,50
	Jl. Pandanaran			
94	Artha Prima Syariah	0,625	2 mk	381.718,75
	Jl. Pandanaran			
95	Gypsum Jaya	2	2 mk	396.500,00
	Jl. Pandanaran			
96	CV. Terang Abadi Motor	2,5	2 mk	401.875,00
	Jl. Pandanaran			
97	Batari	1,875	2 mk	395.156,25
	Jl. Pandanaran			
98	Bank Finance	1,125	2 mk	162.093,75
	Jl. Pandanaran			
99	Bank Finance	1,875		60.078,13
	Jl. Pandanaran			
100	RM. Ueenak Tenan	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
101	Soto Segeer	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
102	Rif Reklame	0,25	2 mk	377.687,50
	Jl. Pandanaran			
103	Joyo Roso	0,375	2 mk	379.031,25
	Jl. Pandanaran			
104	Nalea Cell	0,15	2 mk	376.612,50
	Jl. Pandanaran			
105	Armada Finance	1	2 mk	385.750,00
	Jl. Pandanaran			

106	Sarena Aneka Jasa	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
107	An-Nissa	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
108	An-Nissa	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
109	Masakan Jawa Galaxy	1,125	2 mk	387.093,75
	Jl. Pandanaran			
110	Rony Jaya	2,25	2 mk	399.187,50
	Jl. Pandanaran			
111	Permata Finance	1,5	2 mk	391.125,00
	Jl. Pandanaran			
112	Permata Finance	1		55.375,00
	Jl. Pandanaran			
113	Soto Sedap	1,125		387.093,75
	Jl. Pandanaran			
114	Fortuna Salon & spa	0,5	2 mk	380.375,00
	Jl. Pandanaran			
115	Asyifa	0,375	2 mk	379.031,25
	Jl. Pandanaran			
116	Fortunet	0,75	2 mk	158.062,50
	Jl. Kates			
117	ATM BCA	1,5	2 mk	69.500,00
	Jl. Kates			
118	Bank Bukopin	1,25		388.437,50
	Jl. Pandanaran			
119	Radiator	0,39	2 mk	379.192,50
	Jl. Pandanaran			
120	Rokok Irian (Halte Bus)	9		291.625,00
	Jl. Pandanaran			
121	UDM Stiker	0,15	2 mk	376.612,50
	Jl. Pandanaran			
122	KSP. Intidana	1,125		387.093,75
	Jl. Pandanaran			
123	PNPM Cab. Boyolali kota	1		29.000,00
	Jl. Pandanaran			
124	Praktek Dokter & Apotik Bayu Husada	0,65		190.993,75
	Jl. Pandanaran			
125	BRI	0,65		116.900,00
	Jl. Kates			

126	BRI	0,65		116.900,00
	Mudal			
127	BRI	10		121.250,00
	Jl. Kates			
128	Java Steak	0,3		908.975,00
	Jl. Pandanaran			
129	Mandiri	2		76.000,00
	Jl. Kates			
130	BCA	8		129.000,00
	Jl. Kates			
131	CIMB Niaga	4		77.000,00
	Jl. Kates			
132	ATM CIMB	1,5		139.000,00
	Jl. Kates			
133	Money Gram	1,5		139.000,00
	Jl. Kates			
134	Bank Muamalat	2		152.000,00
	Jl. Kates			
135	Topten (HALTE Bus)	9	2 bh	583.250,00
	Jl. Pandanaran			
136	Topten (HALTE Bus)	9	3 bh	874.875,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
137	Pos Ojek Manunggal	2		259.250,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
138	Bank Muamalat	2		51.000,00
	Jl. Kates			
139	Adira	1,5		44.500,00
	Jl. Kates			
140	Rokok Irian (Halte Bus)	9		291.625,00
	Jl. Perintis Kemerdekaan			
141	Layanan Syariah (Bank Jateng)	1,5		139.000,00
	Jl. Pandanaran			
142	Western Union	0,5		113.000,00
	Jl. Pandanaran			
143	ATM Bank Jateng	1,5		139.000,00
	Jl. Pandanaran			
Jumlah				40.360.192,50

Sumber : Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa, masih banyak objek pajak reklame yang belum terdata oleh kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali terlebih untuk reklame yang berukuran kecil masih banyak yang belum terdata.

Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya kenaikan sebesar Rp 40.360.192,50, dari Rp 70.024.103 menjadi Rp 110.384.295,50, begitu pula dengan penerimaan keseluruhan pajak reklame di Kabupaten Boyolali juga mengalami kenaikan Rp 40.360.192,50 dari Rp 383.754.851 menjadi Rp 424.115.043,50. Sehingga hasil tersebut dapat kita bandingkan, bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui perbandingan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Potensi Pajak Reklame}} \times 100 \% = \text{xxx}$$

Untuk wilayah Kecamatan Boyolali

$$\frac{\text{Rp } 70.024.103,-}{\text{Rp } 110.384.295,50,-} \times 100\% = 63,44 \%$$

Sementara untuk total keseluruhan penerimaan Pajak Reklame tahun 2009, dari

$$\frac{\text{Rp } 383.754.851,-}{\text{Rp } 424.115.043,50,-} \times 100\% = 90,48 \%$$

3. Kendala yang Dihadapi DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam Pemungutan Pajak Reklame

Dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Boyolali, khususnya untuk Wilayah Kecamatan Boyolali masih banyak kekurangan, dikarenakan adanya kendala-kendala yang timbul dalam pemungutannya, yang antara lain :

- a) Kesadaran masyarakat akan pajak masih begitu rendah, akibatnya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai yang terutang.
- b) Masih banyak Wajib Pajak belum tercatat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, khususnya pada bagian Pendapatan Asli Daerah.
- c) Kurangnya petugas lapangan sehingga proses pendataan subjek dan objek reklame belum maksimal.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame ataupun penertiban reklame.
- e) Belum adanya perhitungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali.
- f) Masih terjadi hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Boyolali antara lain kurang akuratnya pendataan potensi Pajak Reklame dan adanya keengganan Wajib Pajak yang memiliki reklame berukuran kecil untuk membayar pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak reklame untuk wilayah Kabupaten Boyolali sebesar 0,3606 %.
2. Potensi pajak reklame yang dipungut untuk wilayah Kecamatan Boyolali adalah 63,44 % dari potensi pajak reklame yang ada.

B. SARAN

Saran-saran yang bisa penulis berikan kepada pihak DPPKAD Kabupaten Boyolali untuk tahun-tahun berikutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten perlu menaikkan target tiap tahunnya dengan cara melakukan penghitungan potensi penerimaan pajak reklame terlebih dahulu pada setiap tahunnya.
2. Melakukan pendekatan dan sosialisai kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak guna mendukung pembangunan daerah.
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang enggan membayar pajak reklame.

4. Menambah jumlah petugas untuk mendata reklame yang ada di Kabupaten Boyolali, terlebih untuk reklame yang berukuran kecil harus dimasukkan dalam pendataan.
5. Intensifikasi pendataan objek atau subjek pajak guna menjamin aktualisasi database yang dimiliki.
6. Melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang telah habis masa pajaknya dan atau yang belum terdata oleh kantor DPPKAD.

